

---

## KONSOLIDASI POLITIK MELALUI PENDEKATAN INSTITUSIONAL DAN TEKNOKRATIK PASCA PILKADA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018

**Wahyudi Pramono**

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Indonesia  
Email: yudiwahyudi150569@gmail.com

\*Korespondensi: yudiwahyudi150569@gmail.com

(Submission 31-xx-2026, Revisions 01-06-2026, Accepted 13-06-2025)

### *Abstract*

*There is a discernible tendency for post-local election political consolidation in various regions of Indonesia to be enacted through mechanisms of political patronage, elite compromise, and the politicization of the bureaucracy. In contrast, in Sampang Regency, post-election political consolidation has been pursued through the reinforcement of bureaucratic reform, the implementation of a merit-based system, and the engagement of the Regional Development Acceleration Team (TP2D) as an instrument for technocratic assistance in local governance. This study aims to examine and elucidate the dynamics of political consolidation following the 2018 Sampang Regency local election. Employing a qualitative approach, this research utilizes in-depth interviews, observational techniques, and documentary analysis involving bureaucratic actors and relevant stakeholders engaged in the process of reforming local government administration. The findings reveal that post-2018 election political consolidation in Sampang Regency was pursued through an institutional strategy underscoring bureaucratic professionalism, governance reinforcement, and the harmonization of regional development policies. This process involved the Regional Development Acceleration Team (TP2D) as a vehicle for academic and technocratic support in bureaucratic reform and the reorganization of local government apparatus. Such an approach fostered relational stability between regional leadership and the bureaucracy, while concurrently bolstering the efficacy of local governance. The study substantiates that post-electoral political consolidation need not be equated with bureaucratic politicization; rather, it may be advanced via a governance framework predicated on institutional empowerment and the technocratic capacity of regional administration.*

**Keywords:** *Political Consolidation, Post Regional Elections, Institutional Approach, Technocracy, Local Governance*

### **Abstrak**

Terdapat kecenderungan konsolidasi politik pasca pilkada di berbagai daerah di Indonesia dilakukan melalui pendekatan patronase politik, kompromi elite, maupun politisasi birokrasi. Namun di Kabupaten Sampang, konsolidasi politik pasca pilkada dilakukan penguatan reformasi birokrasi, *merit system*, dan pelibatan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) sebagai

instrumen pendampingan teknokratik pemerintahan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki dan menjelaskan konsolidasi politik pasca Pilkada Kabupaten Sampang tahun 2018. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor birokrasi serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi politik pasca Pilkada 2018 di Kabupaten Sampang dilakukan melalui pendekatan institusional yang menekankan profesionalisme birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah. Konsolidasi politik dilakukan dengan melibatkan TP2D yang berfungsi sebagai instrumen penguatan akademik dan teknokratik dalam mendukung proses reformasi birokrasi dan penataan organisasi perangkat daerah. Pendekatan tersebut berkontribusi terhadap stabilitas hubungan antara kepala daerah dan birokrasi serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsolidasi politik pasca pilkada tidak selalu identik dengan politisasi birokrasi, tetapi dapat dibangun melalui pendekatan *governance* yang berbasis penguatan institusi dan kapasitas teknokratik pemerintahan daerah.

**Kata Kunci:** *Konsolidasi Politik, Pasca Pilkada, Pendekatan Institusional, Teknokratik, Pemerintahan Lokal*

## PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan bagian penting dari proses demokratisasi lokal di Indonesia. Namun demikian, pilkada tidak hanya menghasilkan kepala daerah terpilih, tetapi juga memunculkan dinamika transisi kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pasca kontestasi elektoral, kepala daerah terpilih seringkali dihadapkan pada tantangan konsolidasi politik dan pemerintahan, terutama dalam membangun hubungan kerja yang efektif dengan birokrasi daerah sebagai instrumen utama penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi kebijakan publik. Dalam banyak kasus politik lokal di Indonesia, proses konsolidasi pasca pilkada seringkali diwarnai oleh ketegangan hubungan antara elite politik dan birokrasi akibat polarisasi politik selama masa kontestasi elektoral (Hadiz, 2019; Warburton, 2020).

Kondisi tersebut menyebabkan birokrasi daerah tidak jarang menjadi arena kompromi politik, patronase kekuasaan, serta distribusi jabatan berbasis loyalitas politik. Kepala daerah terpilih seringkali kali memiliki kecurigaan terhadap loyalitas birokrasi yang dianggap berafiliasi dengan kekuatan politik sebelumnya, sehingga penataan birokrasi pasca pilkada lebih banyak dilakukan melalui pendekatan politik dibandingkan pendekatan profesionalisme administrasi pemerintahan (Hidayat, 2018; Sidel, 2020). Akibatnya, hubungan antara kepala daerah dan birokrasi tidak segera berjalan efektif, bahkan dalam beberapa kasus justru memunculkan fragmentasi birokrasi, konflik internal organisasi pemerintahan, dan rendahnya efektivitas implementasi kebijakan publik.

Dalam perspektif *governance*, konsolidasi politik pasca pilkada seharusnya tidak hanya dipahami sebagai upaya stabilisasi kekuasaan politik kepala daerah terpilih, tetapi juga sebagai proses penguatan kelembagaan pemerintahan daerah melalui tata kelola birokrasi yang profesional, efektif, dan adaptif terhadap agenda pembangunan daerah (Fukuyama, 2013; Peters, 2021). Karena itu, konsolidasi politik yang hanya bertumpu

pada kompromi elite dan distribusi patronase politik berpotensi melemahkan kapasitas birokrasi pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Beberapa penelitian tentang hubungan kepala daerah dan birokrasi pasca pilkada menunjukkan adanya persoalan seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), konflik elite politik, dan politisasi birokrasi pemerintahan daerah. Penelitian Firas, Rizky, dan Maesarini (2024), misalnya, menunjukkan bahwa birokrasi pasca pilkada masih dipengaruhi kultur patrimonial dan hubungan *patron-client* sehingga profesionalisme birokrasi sulit berkembang secara optimal. Penelitian Minan (2020) juga menjelaskan bahwa pilkada langsung sering kali memunculkan *abuse of power* kepala daerah terhadap birokrasi pemerintahan. Sementara penelitian Sumarlin et al. (2024) menegaskan bahwa loyalitas politik ASN dan lemahnya penerapan *merit system* masih menjadi tantangan utama birokrasi daerah dalam menjaga profesionalisme pasca kontestasi politik lokal.

Fenomena menarik terjadi dalam kepemimpinan Bupati Sampang pasca Pilkada 2018. Dalam konteks konsolidasi politik, pemerintah Kabupaten Sampang memiliki pendekatan yang berbeda. Pasca pilkada, pemerintah Kabupaten Sampang menggunakan pendekatan institusional dan teknokratik dengan menekankan reformasi birokrasi, penguatan *merit system*, serta pendampingan tata kelola pemerintahan melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Dalam konteks ini, TP2D tidak diposisikan sebagai instrumen politik praktis, melainkan sebagai tim asistensi strategis yang memberikan penguatan akademik, teknokratik, dan sinkronisasi kebijakan pemerintahan daerah. Pendekatan tersebut memungkinkan proses transisi pemerintahan sebagai bagian penting dari konsolidasi politik berjalan relatif stabil serta mempercepat penyesuaian birokrasi terhadap visi pembangunan daerah, yaitu "*Sampang Hebat Bermartabat*."

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap proses konsolidasi politik pasca Pilkada 2018 di Kabupaten Sampang yang dilakukan melalui pendekatan institusional dan teknokratik. Penelitian ini juga dilakukan untuk menjelaskan bagaimana reformasi birokrasi, *merit system*, dan pendampingan kelembagaan melalui TP2D digunakan sebagai instrumen untuk membangun stabilitas pemerintahan daerah, memperkuat kapasitas birokrasi, serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah pasca kontestasi politik lokal. Fenomena ini berbeda dengan kecenderungan yang ada di Indonesia pasca pilkada yang sering diwarnai dengan problem politisasi birokrasi dan konflik elite pasca pilkada.

Penulis menilai bahwa reformasi birokrasi, penguatan *merit system*, dan pendampingan kelembagaan melalui TP2D yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sampang dapat menjadi instrumen konsolidasi pemerintahan daerah tanpa harus terjebak dalam praktik patronase politik birokrasi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa konsolidasi politik pasca pilkada tidak selalu identik dengan politisasi birokrasi, tetapi juga dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan berbasis *governance*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika konsolidasi politik antara kepala daerah terpilih dan birokrasi dalam konteks pemerintahan daerah pasca Pilkada. Fokus penelitian adalah Kabupaten Sampang dengan unit analisis kepemimpinan Bupati Sampang pasca-Pilkada 2018. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap proses konsolidasi politik dan penataan birokrasi. Informan penelitian meliputi Bupati Sampang, Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang, Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Daerah (Pemda) Sampang, Sekertaris Daerah Sampang, dan beberapa Kepala Dinas.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, studi dokumentasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen mutasi dan promosi jabatan, serta pidato dan pernyataan resmi kepala daerah. Observasi terbatas dilakukan untuk melengkapi pemahaman terhadap pola interaksi birokrasi dan kepala daerah. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik.

## PEMBAHASAN

Dalam banyak kasus pemerintahan daerah di Indonesia, transisi kekuasaan pasca pilkada sering kali diikuti ketegangan politik birokrasi akibat kekhawatiran mutasi jabatan, fragmentasi loyalitas aparat, maupun perubahan konfigurasi kekuasaan dalam organisasi pemerintahan daerah (Hidayat, 2018; Muhtadi, 2020). Situasi tersebut umumnya menyebabkan proses konsolidasi pemerintahan berjalan lambat karena kepala daerah terpilih lebih banyak menggunakan pendekatan politik patronase dalam membangun stabilitas kekuasaan birokrasi. Namun, proses konsolidasi terjadi secara berbeda setelah pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sampang tahun 2018. Haji Slamet Junaidi yang berhasil memenangkan kontestasi dalam pilkada tersebut dan kemudian dilantik sebagai Bupati Sampang periode 2019-2024, melakukan pendekatan yang berbeda dalam melakukan konsolidasi politik.

Proses konsolidasi politik dimulai dengan komitmen H. Slamet Junaidi sebagai Bupati Sampang yang menyatakan menolak terhadap praktik jual-beli jabatan di lingkungan birokrasi pemerintah daerah. Dalam berbagai kesempatan, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi secara terbuka menyampaikan komitmen untuk menjaga integritas birokrasi pemerintahan daerah. Implikasinya, komitmen ini tidak hanya memiliki dimensi simbolik politik, tetapi juga mencerminkan upaya membangun legitimasi moral dan kelembagaan dalam proses reformasi birokrasi. Langkah ini semakin kuat ketika pemerintah Kabupaten Sampang memilih membangun konsolidasi pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi, *merit system*, dan pendekatan tata kelola pemerintahan berbasis kapasitas kelembagaan.

Konsolidasi politik pasca Pilkada 2018 di Kabupaten Sampang dibangun melalui pendekatan institusional dan teknokratik yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan daerah serta profesionalisme birokrasi. Pendekatan institusional terlihat

melalui penataan pejabat pimpinan tinggi pratama dengan menggunakan mekanisme seleksi terbuka dan profesional. Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk panitia seleksi yang melibatkan TP2D sebagai bagian dari tim asistensi strategis pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, TP2D tidak diposisikan sebagai instrumen politik praktis kepala daerah, melainkan sebagai institusi pendukung yang memberikan penguatan akademik dan teknokratik terhadap kebutuhan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Keterlibatan TP2D diarahkan untuk membantu sinkronisasi antara visi pembangunan kepala daerah dengan kebutuhan kapasitas birokrasi pemerintahan sehingga proses penataan organisasi perangkat daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendukung efektivitas implementasi kebijakan publik.

Dalam perspektif reformasi birokrasi, mekanisme tersebut mencerminkan penerapan *merit system* yang menempatkan kompetensi, integritas, dan kapasitas manajerial sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan birokrasi (Dwiyanto, 2019; Yusuf, 2022). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola konsolidasi pemerintahan melalui pendekatan institusional dan teknokratik tersebut mampu mereduksi ketegangan politik internal birokrasi pasca pilkada. Sejumlah informan penelitian menyatakan bahwa birokrasi relatif lebih cepat menyesuaikan diri dengan arah kebijakan pemerintahan daerah karena proses penataan jabatan dilakukan secara terbuka dan berbasis kapasitas profesional. Dalam perspektif *local governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan stabilitas pemerintahan daerah pasca kontestasi politik lokal (Pramusinto & Purwanto, 2018; Fukuyama, 2013).

Dalam perspektif Weberian, legitimasi kepemimpinan birokrasi modern dibangun melalui prinsip rasional-legal yang menempatkan profesionalisme, integritas, dan kompetensi sebagai dasar utama dalam tata kelola birokrasi pemerintahan (Weber, 2019; Peters, 2021). Karena itu, komitmen kepala daerah terhadap *merit system* menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan birokrasi sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai kebijakan reformasi birokrasi, termasuk evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama, seleksi terbuka jabatan strategis, serta penguatan sistem pengawasan internal pemerintahan daerah. Proses tersebut memungkinkan munculnya pejabat birokrasi yang memiliki kapasitas profesional dan kemampuan manajerial yang lebih baik dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsolidasi politik pasca pilkada tidak selalu identik dengan praktik patronase politik dan politisasi birokrasi, tetapi juga dapat dibangun melalui pendekatan institusional dan teknokratik yang menekankan penguatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme birokrasi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Hasil wawancara dengan beberapa pejabat pemerintah daerah menunjukkan bahwa pendekatan tersebut secara signifikan mengurangi ketegangan politik di lingkungan birokrasi pada awal masa pemerintahan. Para pejabat birokrasi tidak lagi berada dalam posisi defensif atau menunggu arah politik kepala daerah, melainkan dapat segera menyesuaikan diri dengan agenda kebijakan pemerintah daerah yang baru.

Kepala BKPSDM Kabupaten Sampang, dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa proses seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama pasca Pilkada 2018 dilakukan melalui mekanisme yang lebih terbuka, profesional, dan berbasis kompetensi. Dalam proses tersebut, TP2D dilibatkan bukan sebagai instrumen politik kepala daerah, melainkan sebagai tim asistensi yang memberikan penguatan akademik dan teknokratik terhadap kebutuhan reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Kepala BKPSDM Sampang juga menjelaskan bahwa keterlibatan TP2D diarahkan untuk membantu pemerintah daerah memetakan kebutuhan kapasitas birokrasi yang sesuai dengan agenda pembangunan daerah serta kebutuhan tata kelola pemerintahan modern. Kepala BKPSDM menyatakan bahwa: *“TP2D lebih berfungsi memberikan kajian dan pertimbangan teknokratik terkait kebutuhan kompetensi pejabat yang dibutuhkan pemerintah daerah. Jadi bukan menentukan orang secara politik, tetapi membantu memberikan masukan akademik mengenai kapasitas birokrasi yang dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan daerah.”*

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sampang yang menyatakan bahwa pelibatan TP2D menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan tim pendamping yang mampu memberikan perspektif akademik, tata kelola organisasi, dan penguatan manajemen pemerintahan dalam proses penataan birokrasi pasca Pilkada. Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa TP2D membantu memberikan analisis kebutuhan organisasi dan kapasitas kelembagaan OPD. Jadi perannya lebih pada penguatan aspek teknokratik dan tata kelola pemerintahan, terutama dalam memastikan bahwa pejabat yang dipilih memiliki kapasitas manajerial dan kemampuan mendukung agenda reformasi birokrasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang menyatakan bahwa proses seleksi jabatan tetap dilaksanakan sesuai prinsip *merit system* dan regulasi manajemen ASN. Dalam konteks tersebut, TP2D diposisikan sebagai tim asistensi strategis yang membantu pemerintah daerah memperkuat kualitas kebijakan birokrasi dan sinkronisasi agenda pembangunan daerah dengan kapasitas aparatur pemerintahan. Dalam kaitan tersebut, Sekretaris Daerah menyatakan bahwa: *“Keberadaan TP2D lebih pada membantu pemerintah daerah dari sisi pemikiran strategis, kajian teknokratik, dan pendampingan reformasi birokrasi. Pemerintah daerah membutuhkan masukan akademik dan profesional agar penataan birokrasi tidak sekadar administratif tetapi benar-benar mendukung efektivitas pemerintahan daerah.”*

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang yang menilai bahwa keberadaan TP2D membantu menciptakan pola birokrasi yang lebih profesional dan terukur. Menurutnya, proses seleksi jabatan menjadi lebih objektif karena pemerintah daerah tidak hanya mempertimbangkan loyalitas birokrasi, tetapi juga kebutuhan kompetensi teknis dalam mendukung program pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa: *“TP2D banyak memberikan penguatan dari sisi teknis dan kebutuhan pembangunan daerah. Jadi yang dilihat bukan sekadar kedekatan, tetapi apakah pejabat tersebut punya kemampuan menjalankan program pembangunan dan memperkuat kinerja organisasi.”*

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang yang menyatakan bahwa keterlibatan TP2D membantu OPD lebih memahami arah reformasi birokrasi dan target pembangunan daerah secara lebih sistematis. Menurutnya, birokrasi menjadi lebih fokus pada capaian kinerja karena proses penataan organisasi dilakukan dengan pendekatan profesional dan berbasis kebutuhan kelembagaan pemerintahan daerah. Ia menjelaskan bahwa: *“Dengan adanya pendampingan dari TP2D, OPD lebih memahami target pembangunan daerah dan kebutuhan penguatan organisasi. Jadi birokrasi tidak hanya bekerja administratif, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas dan pencapaian kinerja pemerintahan daerah.”*

Pendekatan institusional dan teknokratik yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sampang pada akhirnya mampu menciptakan stabilitas hubungan antara kepala daerah dan birokrasi. Stabilitas ini kemudian berdampak pada percepatan implementasi berbagai program pembangunan daerah yang menjadi bagian dari visi pembangunan *“Sampang Hebat Bermartabat”*. Program-program pembangunan di bidang pelayanan publik, infrastruktur daerah, dan reformasi birokrasi dapat dijalankan secara lebih terkoordinasi karena adanya keselarasan antara kepemimpinan politik dan struktur birokrasi. Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sampang berhasil melakukan konsolidasi politik pasca Pilkada 2018. Keberhasilan konsolidasi politik berbasis reformasi birokrasi tersebut juga tercermin dalam peningkatan sejumlah indikator tata kelola pemerintahan daerah selama periode 2019–2024. Diantaranya adalah Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang yang meningkat dari 56,90 pada tahun 2020 menjadi 77,45 pada tahun 2024.

Selain itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Indeks Kepuasan Masyarakat juga mengalami peningkatan secara konsisten. Temuan ini memperlihatkan bahwa konsolidasi politik yang dibangun melalui pendekatan institusional dan merit sistem dapat memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, konsolidasi politik tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses penyelarasan elite politik pasca pilkada, tetapi juga sebagai strategi membangun pemerintahan daerah yang profesional, stabil, dan berorientasi pada pelayanan publik (Peters, 2021; Warburton, 2020).

Perkembangan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 ketika nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Sampang meningkat menjadi 63,15. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa agenda reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah mulai menghasilkan dampak yang lebih konkret dalam aspek tata kelola pemerintahan. Puncak capaian terjadi pada tahun 2024 ketika indeks RB melonjak menjadi 77,45. Lompatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengkonsolidasikan agenda reformasi birokrasi secara lebih sistematis, termasuk melalui penataan pejabat struktural berbasis *merit system* serta penguatan integritas aparatur.

Keberhasilan tersebut juga tercermin dalam perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menunjukkan tingkat kematangan birokrasi digital di Kabupaten Sampang. Pada tahun 2024, nilai indeks SPBE mencapai angka 3,67 dengan predikat *“Baik”*, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 3,57. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya transformasi tata

kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan birokrasi. Transformasi digital ini menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang diarahkan tidak hanya pada perubahan struktural organisasi, tetapi juga pada perubahan budaya kerja aparatur menuju sistem pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, indikator kualitas pelayanan publik juga menunjukkan tren yang positif. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Sampang meningkat dari 81,43 pada tahun 2020 menjadi 82,67 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa kebijakan reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah tidak hanya berdampak pada aspek internal organisasi, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Hal ini diperkuat oleh capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sampang pada tahun 2024 yang mencapai nilai 4,60 dari skala 5 dengan kategori pelayanan prima.

Indikator lain yang menunjukkan penguatan tata kelola pemerintahan adalah capaian nilai SAKIP yang mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Nilai SAKIP Kabupaten Sampang meningkat dari kategori B pada tahun 2020 menjadi kategori BB pada tahun 2022 hingga 2024 dengan nilai 72,43. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja pemerintah daerah telah berjalan secara lebih terukur dan akuntabel, ditandai dengan perencanaan kinerja yang lebih terintegrasi, sistem pengukuran kinerja yang lebih jelas, serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan dan evaluasi kinerja organisasi.

Jika dianalisis lebih lanjut, peningkatan berbagai indikator tata kelola pemerintahan daerah di atas menunjukkan bahwa konsolidasi politik pasca pilkada tidak hanya berdampak pada stabilitas hubungan antara kepala daerah dan birokrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah. Dalam perspektif *governance*, konsolidasi politik tidak semata dipahami sebagai proses stabilisasi kekuasaan politik pasca kontestasi elektoral, melainkan sebagai proses institusionalisasi tata kelola pemerintahan yang bertujuan membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik (Fukuyama, 2013; Peters, 2021). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan institusional dan teknokratik yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sampang mampu menciptakan hubungan kerja pemerintahan yang lebih stabil sekaligus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan temuan di atas, dapat dinyatakan bahwa konsolidasi politik pasca Pilkada 2018 di Kabupaten Sampang dapat dipahami sebagai model penguatan *governance* pemerintahan daerah yang berbasis legitimasi politik, reformasi birokrasi, dan profesionalisme aparatur sipil negara. Model ini menempatkan kepala daerah tidak hanya sebagai aktor politik yang memperoleh legitimasi elektoral melalui pilkada, tetapi juga sebagai aktor institusional yang berperan dalam membangun sistem birokrasi yang profesional, berintegritas, dan memiliki kapasitas tata kelola pemerintahan yang efektif. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penguatan *merit system*, seleksi jabatan birokrasi berbasis kompetensi, serta pelibatan institusi dan kelembagaan TP2D dalam proses penataan birokrasi pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, model konsolidasi politik pemerintah Kabupaten Sampang tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling memperkuat antara legitimasi politik kepala daerah dengan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah. Stabilitas hubungan antara kepala daerah dan birokrasi memungkinkan proses reformasi birokrasi berjalan lebih efektif, sementara peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada akhirnya turut memperkuat legitimasi politik kepala daerah di tingkat lokal. Dengan demikian, konsolidasi politik pasca pilkada dalam penelitian ini tidak dipahami dalam kerangka patronase politik ataupun dominasi kekuasaan terhadap birokrasi, tetapi sebagai proses *institutional governance consolidation* yang menempatkan reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan sebagai fondasi utama stabilitas pemerintahan daerah. Secara diagram, model konsolidasi politik pasca pilkada di Kabupaten Sampang bisa digambarkan sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1. Model Konsolidasi Politik Pasca Pilkada 2018 di Kabupaten Sampang



(Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026)

Keberhasilan konsolidasi politik pasca pilkada yang menggunakan pendekatan institusional dan teknokratik, dari perspektif politik lokal, juga memiliki implikasi elektoral. Kinerja pemerintahan yang relatif stabil dan program pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat menjadi salah satu faktor yang memperkuat legitimasi politik kepala daerah di tingkat lokal. Hal ini tercermin dalam keberhasilan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi untuk kembali memenangkan Pilkada 2024. Temuan ini memperkuat argumen bahwa konsolidasi politik yang efektif tidak selalu identik dengan politisasi birokrasi. Sebaliknya, konsolidasi politik dapat dilakukan melalui mekanisme institusional yang menekankan profesionalisme aparatur dan penyelarasan agenda kebijakan antara kepemimpinan politik dan birokrasi pemerintahan.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsolidasi politik pasca Pilkada 2018 di Kabupaten Sampang dibangun melalui pendekatan institusional dan teknokratik yang menekankan reformasi birokrasi, penguatan *merit system*, dan profesionalisme aparatur sipil negara. Konsolidasi politik tidak dilakukan melalui pola patronase politik ataupun politisasi birokrasi, melainkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional, transparan, dan berbasis kapasitas kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan birokrasi melalui mekanisme seleksi jabatan yang terbuka, pelibatan unsur akademik dan teknokratik, serta penguatan fungsi asistensi strategis melalui TP2D mampu menciptakan stabilitas hubungan antara kepala daerah dan birokrasi pasca Pilkada. Pendekatan tersebut mempercepat sinkronisasi antara visi pembangunan kepala daerah dengan kapasitas birokrasi pemerintahan daerah sehingga mendukung efektivitas implementasi kebijakan publik dan penguatan local governance.

Secara empiris, pendekatan institusional dan teknokratik tersebut berkontribusi terhadap peningkatan berbagai indikator tata kelola pemerintahan daerah, seperti reformasi birokrasi, SPBE, SAKIP, dan kualitas pelayanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas hubungan antara kepala daerah dan birokrasi menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Secara teoritik, penelitian ini memperkuat kajian politik lokal dan administrasi publik dengan menunjukkan bahwa konsolidasi politik pasca pilkada tidak selalu berujung pada patronase politik maupun politisasi birokrasi. Studi ini menawarkan perspektif *governance-oriented political consolidation*, yaitu konsolidasi politik yang dibangun melalui penguatan institusi pemerintahan, reformasi birokrasi, dan pendekatan teknokratik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2019). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Firman, T. (2020). *Bureaucratic Reform and Local Governance in Indonesia*. *Journal of Governance Studies*. 12(2).
- Fitriani, N. & Hidayat, S. (2019). *Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. *Jurnal Bina Praja*. 11(2). 215–227.
- Grindle, M.S. (2019). *Politics and Policy Implementation in Developing Countries*. Princeton University Press.
- Hadiz, V.R. (2019). *Local Power and Politics in Indonesia*. *Journal of Contemporary Asia*. 49(3).
- Hidayat, S. (2018). *Politik Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia*. LP3ES.
- Huda, M. & Firman, T. (2020). *Collaborative Governance dalam Pembangunan Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 5(1), 45–58.
- Kurniawati, D. & Suryanto. (2021). *Inovasi Kelembagaan dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*. 12(1), 67–79.
- Mietzner, M. (2019). *Political Competition and Local Democracy in Indonesia*. *Asian Studies Review*. 43(2).
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme dan Politik Elektoral di Indonesia*. LP3ES.
- Muhtadi, B. (2020). *Clientelism and Electoral Politics in Indonesia*. *Asian Journal of Political Science*. 28(1).
- Munandar, A., Pramono, W. & Romli, L. (2025). *Local Elites' Rivalry and Circulation: Contestation Between Kiai, Blater, and Klebun In The 2018 Regional Head Election in Sampang–Madura Regency*. *The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies*.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). (2021). *Government at A Glance: Public Governance Indicators*. OECD Publishing.
- Peters, B. G. (2021). *The Politics of Bureaucracy* (7th ed.). Routledge.
- Pramono, W. (2025). *Islam, Demokrasi dan Elite lokal: Studi kasus Pilkada Sampang 2018*. Kreasi Cendekia Pustaka.
- Pramono, W. (2025). *Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pantura Agro Wisata (PAS) Gemilang Kabupaten Sampang: Kajian Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial*. *Iso: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. 5(2).
- Pramono, W. et al. (2025). *Kemenangan Model Sosial H. Slamet Junaidi dalam Pilkada Sampang 2024*. *Journal of Administration, Governance and Political Issues*. 5(3).
- Pramusinto, A., & Purwanto, E.A. (2018). *Governance Reform Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

- 
- Raharjo, J.S. & Khair, O.I. (2022). *Peran Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Inovasi Pembangunan Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 18(1), 89–101.
- Rasyid, Ryaas. (2019). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Yarsif Watampone.
- Romli, Lili. (2018). *Dinamika Elite Lokal dalam Politik Daerah di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Politik*. 15(2). 153–168.
- Setiawan, A. & Pratama, R. (2020). *Reformasi Birokrasi dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Borneo Administrator*. 16(3), 305–320.
- Suharto, Edi. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Sutrisno, B. (2021). *Governance Innovation dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*. 14(2), 120–134.
- Wicaksono, A. & Nurmandi, A. (2019). *Policy Advisory System dalam Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4(2), 210–222.
- Wicaksono, K.W. (2020). *Politik Administrasi dan Kinerja Pemerintahan Daerah*. Prenadamedia Group.
- Yuliani, F. & Hidayat, R. (2022). *Peran Tim Ahli dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 26(1), 55–68.
- Yusuf, A. (2022). *Merit System Implementation in Indonesian Bureaucracy*. *Jurnal Administrasi Publik*. 19(1).